

Radio PDRI 1948-1949: Antara Propaganda dan Komunikasi Diplomatik

Hanif Risa Mustafa ^{a,1,*}, Septi Utami ^{b,2}

^a Universitas Jambi, Jambi, Indonesia.

^b Alumni Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

¹ hanifmustafa@unja.ac.id; ² utamipaay@gmail.com.

* Corresponding Author: Hanif Risa Mustafa



Received 1 November 2023; accepted 3 Desember 2023; published 30 Desember 2023

ABSTRACT

Kajian tentang radio masa revolusi di Indonesia menciptakan sebuah standar kesamaan bahwa radio merupakan sarana komunikasi satu arah untuk menyebarkan informasi ke masyarakat, termasuk dalam tujuan propaganda. Radio difungsikan sebagai alat perjuangan dalam mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana gagasan Gramsci, kekuasaan diperoleh bukan hanya dengan jalan kekerasan semata, tetapi juga melalui persuasi. YBJ-6 dan Radio Rimba Raya merupakan dua di antara radio-radio yang digunakan pada masa PDRI dalam perjuangan revolusi. YBJ-6 dan Radio Rimba Raya difungsikan sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Tetapi apakah YBJ-6 dan Radio Rimba Raya hanya berfungsi untuk menyebarkan pesan perjuangan atau juga sebagai alat komunikasi diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan sejarah. Hasil pembahasan dan diskusi didapatkan bahwa radio-radio PDRI tidak hanya berfungsi sebagai penyebar pesan perjuangan dalam rangka memperoleh kepercayaan publik, tetapi juga alat berkomunikasi dalam rangka diplomasi pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia.

KEYWORDS

Radio,
PDRI,
Propaganda,
Komunikasi.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. Pendahuluan

Sjafruddin Prawiranegara menyatakan bahwa Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno-Hatta. Hal ini diikrarkan olehnya setelah kejatuhan ibu kota Indonesia di Yogyakarta 19 Desember 1948. Pernyataan ini bukan tanpa sebab, Sjafruddin Prawiranegara sendiri telah mendapat mandat dari Presiden RI Soekarno untuk membentuk pemerintahan darurat Indonesia di Sumatera Barat (2017, 69). Di mana saat itu Belanda berusaha melumpuhkan kedaulatan Indonesia di mata Internasional dengan menangkap Soekarno beserta Hatta. Tak ayal pasca penangkapan Soekarno Hatta, Belanda melancarkan propaganda melalui siaran radio yang menyatakan Pemerintah Indonesia telah dihancurkan dan status quonya sudah lenyap (2010, 4). Tentu propaganda tersebut membuat seolah-olah Pemerintah Indonesia hanyalah sekelompok pemberontak yang berusaha menggulingkan Pemerintahan Belanda.

Sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, Mr. Sjafruddin Prawiranegara bertindak cepat dengan menyusun pemerintahan darurat di Sumatra Barat. Sejumlah tokoh dilibatkan dalam rapat ini dan pada tanggal 22 Desember 1948 terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Agar Indonesia tetap diakui masyarakat dan mata dunia, PDRI memanfaatkan radio untuk menunjukkan bahwa Pemerintahan Indonesia masih berdiri pasca Agresi Militer II. Bahkan dalam siarannya, Sjafruddin Prawiranegara menegaskan bangsa Indonesia tidak akan putus asa dan menyerah setelah pimpinan tertingginya ditawan. Sjafruddin Prawiranegara juga menyerukan kepada para pejuang untuk terus mengangkat senjata dan tidak berhenti jika belum ada perintah (Imran, Djamhari, and Chaniago 2005, 89).

Upaya PDRI ini ternyata tidak mudah, stasiun radio yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia diincar oleh Belanda. Siaran radio yang dilancarkan PDRI menjadi ancaman Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Belanda pun berusaha menghancurkan stasiun

pemancar radio yang digunakan PDRI tersebut. Demi menghindari serangan Belanda, radio-radio tersebut dibawa bergerilya ke dalam hutan (2010, 56).

Radio Yankee Bravo Juliet-6 dan Radio Rimba Raya, merupakan dua di antara radio-radio yang turut bergerilya. Radio Yankee Bravo Juliet-6 atau radio YBJ-6 milik PTT (Pos, Telegraf, Telepon) Bukittinggi. Sebelumnya radio YBJ-6 merupakan mesin yang dimiliki oleh Stasiun Radio Jawatan PTT di Ateh Lurah Tarok Bukittinggi. Tetapi gedung stasiun hancur setelah dibombardir oleh pesawat perang Belanda. Beruntung mesin radio YBJ-6 yang ada pada gedung tidak rusak. Mesin radio YBJ-6 tersebut selanjutnya diselamatkan oleh operator PTT Bukittinggi. Operator PTT Bukittinggi ini juga mengumpulkan beberapa peralatan tambahan pemancar radio yang masih bisa digunakan. Sehingga PDRI bisa mengabarkan kondisi terkini Pemerintahan Indonesia dan melanjutkan perjuangan (*Berita Yudha* 1989). Radio Rimba Raya juga turut dalam menginformasikan kondisi terkini Pemerintah Indonesia. Radio Rimba Raya sendiri merupakan pemancar radio yang diselundupkan dari Malaya ke Aceh. Di mana saat itu pemancar radio tambahan sangat dibutuhkan (Sufi 1999, 50).

Kajian tentang peran radio masa revolusi di Indonesia sebenarnya cukup beragam, seperti dalam jurnal *Defending Indonesian Sovereignty through Mass Media*. Menjelaskan bahwa Radio menjadi sebuah alat perjuangan, di mana melalui radio para pejuang mengirimkan pesan-pesan perjuangan. Pesan tersebut disiarkan agar diketahui publik sehingga mampu menepis propaganda dan provokasi Belanda (Muttaqin, Mokodenseho, and Widjayanto 2022). Berbagai hipotesis yang sama pun bermunculan bahwa radio merupakan sebuah sarana komunikasi satu arah dengan jalan menyiarkan suatu informasi untuk tujuan penyebarluasan propaganda. Sebagaimana pada jurnal *Lagu Propaganda dalam Revolusi Indonesia 1945-1949*, bahwa radio merupakan satu di antara sarana komunikasi yang penting dalam penyebarluasan informasi termasuk lagu-lagu propaganda (Mintargo 2003). Propaganda sendiri menjadi upaya nyata dalam mempengaruhi individu ataupun kelompok, sehingga mau mengikuti kemauan dari propagandis. Tujuannya untuk memanipulasi kepercayaan (Andriyanto, Wardhana, and Pradita 2021, 1).

Analogi inipun menciptakan standar kesamaan bahwa radio masa agresi merupakan sarana komunikasi satu arah untuk menyebarluaskan informasi ke masyarakat, baik luar dan dalam negeri dengan tujuan propaganda. Namun apakah radio perjuangan lainnya juga sama menjalankan fungsi tersebut, atau justru sebaliknya, di mana radio memiliki peran yang berbeda-beda, yaitu menjadi alat komunikasi dua arah untuk keperluan komunikasi diplomatik maupun militer. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam jurnal *Batalion Singa Harau 1945-1949*, para pimpinan pemerintah dan militer menggunakan radio untuk berkomunikasi (Asmara and Yuhardi 2022).

Terlepas hal tersebut, radio YBJ-6 dan Radio Rimba Raya telah memberi semangat baru kepada masyarakat dan dunia bahwa kedaulatan Indonesia masih bisa dipertahankan meski adanya Agresi Militer II Belanda. Kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat (Setyo Nugroho 2013). Maka kedaulatan Indonesia merupakan kekuasaan yang mutlak dimiliki Indonesia serta tidak bisa diganggu lagi. Sementara Gramsci, dalam teori hegemoni, berpendapat bahwa kekuasaan diperoleh bukan hanya dengan jalan kekerasan semata, tetapi juga melalui persuasi (2015, 128). Persuasi yang dimaksud upaya mempengaruhi kepercayaan dan harapan. Sehingga wajar apabila PDRI menggunakan radio YBJ-6 maupun Radio Rimba Raya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dunia dan harapan bagi masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan, yang mana sempat dipengaruhi melalui propaganda Belanda. Pada dasarnya kedaulatan negara juga tidak lepas dari pengamatan dan pengakuan masyarakat. Sebagaimana tertulis dalam *Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of states of 1993*, syarat berdirinya negara dengan adanya rakyat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain (A. Masyhur Effendi and Andri Andri 2011).

Radio dan PDRI sendiri tidak bisa dipisahkan dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Merujuk pada pendapat Sejarawan Aminudin Kasdi, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukanlah hal yang kebetulan (2005, 12). Maka penggunaan radio dalam perjuangan bukanlah hal yang kebetulan. Tetapi memang ada maksud untuk mencapai suatu tujuan yakni kedaulatan Bangsa Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan sejarah. Pada metode ini, pengumpulan sumber dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur. Adapun literatur yang digunakan tidak terbatas pada surat kabar dan majalah, tetapi juga menggunakan buku dan penelitian terdahulu atau jurnal. Menurut Mestika Zed, penelitian pustaka memanfaatkan berbagai sumber pustaka untuk mendapatkan data penelitian yang berkaitan. Bisa dikatakan, penelitian pustaka memanfaatkan koleksi kepastakaan tanpa memerlukan riset lapangan dalam melaksanakan penelitian (Zed 2008, 2). Di mana dalam riset kepastakaan ini tanpa mengesampingkan kritik sumber, sebagaimana yang dikenal dalam tahapan penelitian sejarah. Selanjutnya dari tahapan tersebut didapatkan fakta-fakta terkait dan relevan dengan penelitian yang dimaksud.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Radio Masa Perang

Perang kemerdekaan Indonesia bukan sekedar melakukan perjuangan melalui kontak senjata. Tetapi juga menempuh jalan diplomasi. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara-negara lain menjadi hal utama agar Republik Indonesia mencapai kemerdekaan yang *de facto*. PDRI berusaha menjadi penerus usaha kemerdekaan Indonesia saat pemerintahannya tengah mengalami *vacum of power*. Di bawah komando Sjafruddin Prawiranegara, rakyat diminta tetap untuk berjuang, serta radio-radio milik RI yang masih terhubung untuk terus menyiarkan kabar keberadaan Pemerintah Indonesia.

Radio memiliki kedudukan penting dalam perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Radio digunakan sebagai alat komando yang mengkoordinir tentara yang ada di garis terdepan peperangan. Selain itu, radio juga digunakan sebagai senjata dalam perang. Senjata tersebut berupa siaran radio yang menyebarkan propaganda, baik untuk melemahkan lawan ataupun menggalang kekuatan.

Siaran radio sendiri merupakan bagian dari metode propaganda yang sangat potensial untuk digunakan baik dalam strategi perang ataupun politik. Efek dari propaganda mampu memprovokasi massa untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga menjadi bahaya laten yang mempengaruhi kelompok masyarakat (Mintargo 2003, 107).

Sebelum terjadinya perang, pemerintahan Hindia Belanda memanfaatkan radio untuk mengambil hati rakyat, khususnya golongan muda, karena saat itu radio dianggap sebagai alat teknologi yang istimewa dan sarana hiburan paling modern (1945). Masyarakat dapat mendengarkan berbagai siaran berupa sandiwara, berita, dan lain sebagainya melalui radio. Apalagi siaran televisi belum mengudara di Indonesia, baru tahun 1962 posisi radio tergeser oleh televisi (Permana, Abdullah, and Mahameruaji 2019). Siaran radio oleh Belanda merupakan jalan halus dalam menguatkan hegemoni kekuasaan atas wilayah Indonesia. Adapun siaran kala itu membawa isu-isu besar berupa politik kolonial dan modernitas (Barendregt and Yampolsky 2014, 9).

Belum selesai penyebaran kebudayaan barat melalui Radio oleh Belanda, Jepang sudah mendarat di wilayah Indonesia. Pasukan Jepang menggeser kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia. Termasuk meniadakan siaran-siaran yang menyebarkan budaya Barat. Sebaliknya pasukan Jepang memberi kesempatan bagi pribumi untuk mengembangkan kebudayaan ketimuran melalui siaran radio. Tidak hanya sebagai hiburan dan kerohanian kemasyarakatan, Radio juga didorong serta diarahkan menjadi alat perjuangan dalam menghadapi perang (1945).

Radio dalam menghadapi perang ini dimaksudkan sebagai alat penghubung dalam perang. Radio digunakan sebagai alat komunikasi yang memberikan komando dan menyampaikan gambaran situasi medan perang serta agitasi politik (*Berita Yudha* 1989). Maka oleh Militer Indonesia radio dimanfaatkan guna mengorganisir pasukan yang berada di garis depan dalam menghalau musuh, sehingga strategi perang yang akan digunakan bisa dikoordinasikan dengan cepat meski berbeda tempat dan lokasi. Selain itu radio ditujukan sebagai usaha propaganda dalam usaha perang. Bahkan pejuang kemerdekaan mengibaratkan radio sebagai peluru. Di mana peluru tersebut diarahkan ke hati para pendengarnya, baik dalam maupun luar negeri. Siaran radio tersebut diyakini mampu mempersatukan rakyat untuk berjuang bersama, dan di sisi lain juga mampu mematahkan mental dan semangat perlawanan musuh (1945).

Radio sendiri merupakan sebuah benda yang mewah pada zaman kemerdekaan. Tidak semua orang memiliki benda tersebut. Hanya segelintir orang yang memiliki benda yang bisa menyiarkan suara secara langsung saat itu. Sehingga agar siaran dalam negeri bisa menyampaikan himbuan serta keterangan jalannya perang. Pemerintah membuat radio umum. Radio umum ini ditempatkan di lokasi yang strategis dan ditujukan kepada masyarakat yang ada di Kampung atau desa (1945). Sementara satuan-satuan perhubungan radio yang ada di Sumatera menyebar di beberapa titik, di antaranya Indonesia Republic News Palembang, Satuan PHB Bukit Tinggi, Padang, Medan serta Kotaraja (Banda Aceh) (*Berita Yudha* 1984a).

3.2. Pasca Gagalnya Perjanjian Renville

Belanda melancarkan Agresi Militer kedua setelah perundingan Renville mengalami jalan buntu. Diketahui perundingan dihadiri oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin sebagai delegasi Republik Indonesia, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Raden Abdul Kadir Widjoatmodjo (Supian and Lagut 2020, 158). Sebelum *Operatie Kraai* tersebut berlangsung, pihak Indonesia sebenarnya sudah memperkirakan akan terjadi kemungkinan buruk akibat gagalnya perundingan yang berlangsung pada Juni 1948. Para petinggi pemerintahan Indonesia pun menggelar pertemuan untuk melakukan antisipasi dan rencana pemindahan pemerintahan ke Sumatera. Bahkan Hatta didampingi Sjafruddin Prawiranegara berkunjung ke Bukittinggi untuk merencanakan pemindahan pemerintahan ke Sumatera Barat apabila Belanda benar-benar menyerang Jawa (2010, 46).

Sepulang Hatta dari Bukittinggi, Belanda mengeluarkan ultimatum kepada Indonesia. Belanda meminta agar Indonesia segera mengakui kedaulatan Belanda sepenuhnya. Karena tidak ada tanggapan, malam sebelum Agresi Militer II berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Louis Joseph Maria Beel menyatakan kepada delegasi Republik Indonesia dan KTN (Komisi Tiga Negara) jika Belanda tidak mengakui perjanjian Renville. Kabar anulir tersebut tidak bisa tersampaikan ke Pemerintah Indonesia di Yogyakarta, lantaran sambungan telepon sudah disabotase (*30 Tahun Indonesia Merdeka* 1986, 192).

Akibatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Pemerintah Indonesia di Yogyakarta tidak memiliki persiapan untuk menghadapi serangan mendadak Belanda. Alhasil Belanda mampu melumpuhkan kekuatan militer Indonesia di Yogyakarta dan langsung menguasai pangkalan udara Maguwo dengan cepat (Prapanca Wardhana, Muhadi, and Sanjaya 2019, 33). Tidak cukup disitu saja, Belanda juga melakukan sabotase terhadap alat komunikasi Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Belanda menghancurkan kantor Jawatan PTT dan RRI. Tujuan Belanda menghancurkan kedua jawatan tersebut agar memudahkan untuk melumpuhkan kekuatan militer Pemerintah Indonesia yang ada di luar Yogyakarta. Di waktu yang sama Belanda berusaha menduduki istana negara. Dalam keadaan genting tersebut, para menteri beserta presiden dan wakil presiden melaksanakan rapat darurat. Hasil rapat tersebut diputuskan untuk memerintahkan para tentara yang tersisa beserta rakyat melakukan perang gerilya dan membentuk pemerintahan darurat di Sumatera (2010, 50).

3.3. PDRI Memerintah Indonesia

Kondisi Indonesia di tahun 1948 memang sangat kacau. Kekuasaan Republik Indonesia terdesak hingga ke wilayah pedalaman akibat blokade Belanda atas garis Van Mook. Bahkan perang saudara terjadi di antara pasukan-pasukan republik yang membuat kekuatan Indonesia melemah (2001, 456). Sehingga memungkinkan pasukan Belanda menguasai Yogyakarta dengan mudah dan menawan Soekarno Hatta beserta sejumlah menterinya.

Pada waktu yang bersamaan, tanggal 19 Desember 1948, kabar penyerangan Yogyakarta oleh pasukan Belanda sudah diterima oleh Jawatan PTT Bukittinggi. Saat itu yang menerima telegram adalah Adjas Baheram operator PTT Bukittinggi. Namun selang tak berapa lama pesawat udara milik Belanda beterbangan di langit Sumatera Barat dan berusaha menduduki Bukittinggi. Setelah berhasil menguasai, pusat komunikasi milik Republik Indonesia yang ada di Bukittinggi dihancurkan (Imran, Djamhari, and Chaniago 2005, 67). Termasuk gedung Jawatan PTT, tempat bekerja Adjas Baheram, juga tak luput jadi sasaran pemboman Belanda.

Aksi penghancuran gedung stasiun radio milik Indonesia ternyata tidak hanya terjadi di Bukittinggi. Sejumlah wilayah kekuasaan Indonesia yang memiliki pemancar radio dan landasan udara turut dihancurkan. Setelah berhasil melumpuhkan stasiun pemancar radio, Belanda

melancarkan propaganda ke seluruh dunia. Di mana pihak Belanda mengumumkan bahwasanya Indonesia sudah kalah, dan rakyat menyambut Belanda sebagai pembebas (2019, 83).

Sementara itu, mandat pendirian pemerintahan darurat di Sumatera Barat rupanya tidak kunjung datang. Hal ini membuat Sjafruddin Prawiranegara ragu untuk segera membentuk pemerintahan darurat. Karena sangat mendesak dan mengingat hasil pertemuan beberapa waktu lalu atas rencana pemindahan pemerintahan, akhirnya Sjafruddin Prawiranegara menggelar pertemuan dengan para petinggi Republik Indonesia yang tersisa.

Pertemuan tersebut digelar di Halaban Payakumbuh Sumatera Barat pada tanggal 22 Desember 1948. Adapun tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Sjafruddin Prawiranegara, Ir. Mananti Sitompul, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Latif, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indrachaya, Mr. TM. Hasan, Maryono Danubroto, Mr. A Karim, dan Rusli Rahim. Dari hasil pertemuan diputuskan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berpusat di Halaban Payakumbuh Sumatera Barat. Selanjutnya Sjafruddin Prawiranegara, dengan mengatasnamakan PDRI, menyerukan untuk melakukan perlawanan dengan bergerilya (2010, 56).

Selain itu, Sjafruddin Prawiranegara menginstruksikan kepada seluruh jawatan dan tentara Republik Indonesia mengoptimalkan radio yang masih berfungsi. Di mana radio-radio yang masih terhubung diminta untuk terus menyiarkan kondisi serta keberadaan Indonesia ke berbagai wilayah RI serta ke luar negeri (2019, 86). Adapun radio-radio penghubung tersebut merupakan milik stasiun PHB (Satuan-satuan Perhubungan) AURI serta milik Djawatan PTT yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Termasuk radio YBJ-6 dari Bukittinggi yang diaktifkan kembali agar terhubung dengan radio-radio di berbagai daerah RI hingga luar negeri (*Berita Yudha* 1984b).

3.4. Peran Radio YBJ-6

Keberadaan radio yang terus menyiarkan status keberadaan Indonesia, membuat gusar Belanda. Awalnya Belanda berusaha meyakinkan ke dunia bahwa pemerintahan Indonesia sudah bisa dikalahkan, namun upaya tersebut sia-sia setelah sejumlah stasiun pemancar radio milik Indonesia menyiarkan adanya pemerintahan darurat Indonesia. Bahkan Indonesia tetap berdiri meskipun Soekarno dan Hatta ditangkap. Sehingga wajar Belanda juga mengincar stasiun pemancar radio milik Republik Indonesia.

Di Bukittinggi, Belanda membombardir sejumlah kantor stasiun pemancar radio saat setelah menghancurkan markas tentara Republik Indonesia. Adapun gedung stasiun pemancar radio yang dihancurkan di antaranya Jawatan PTT Birugo Bukittinggi, Stasiun Radio PTT Ateh Lurah Tarok, Stasiun Radio PTT Garegeh, dan RRI Benteng. Beruntung alat pemancar radio YBJ-6 milik Stasiun Radio PTT Ateh Lurah Tarok tidak rusak. Mengetahui hal tersebut, operator PTT Bukittinggi berinisiatif untuk melakukan evakuasi radio YBJ-6. Selanjutnya pegawai PTT ini mengevakuasi alat pemancar radio YBJ-6 pada malam hari demi menghindari kecurigaan musuh (*Berita Yudha* 1989).

Pada kesempatan tersebut, para operator PTT juga mengumpulkan perangkat pendukung pengoperasian YBJ-6 yang masih bisa digunakan, meliputi radio penerima RCA, generator, antena, serta kunci morse. Selanjutnya Radio YBJ-6 beserta alat pengoperasiannya diangkut menggunakan truk menuju Stasiun Radio PTT Garegeh. Pada keesokan harinya para operator PTT mengungsikan Radio YBJ-6 menuju ke Halaban Payakumbuh (*Berita Yudha* 1989).

Sesampainya di Halaban, rombongan operator PTT langsung menemui para petinggi PDRI. Namun rombongan ini harus melanjutkan perjalanan mencari lokasi baru untuk mengaktifkan radio dengan frekuensi 9075 KCS ini, karena di Halaban sudah ada radio milik AURI. Petualangan menegangkan rombongan ini pun baru dimulai. Pemancar Radio YBJ-6 dengan berat 750 Kilogram ini akan dibawa berpindah-pindah lokasi beberapa kali untuk menghindari serangan Belanda. Rombongan gerilya YBJ-6 dikomandoi Mayor D.S. Ardiwinata. Adapun rute gerilya yakni dari Halaban menuju ke Pauh Tinggi. Kemudian dilanjutkan ke Balai Tangah Lintau Buo, lalu ke Palo Alai Seroja, kemudian di Lareh Aia Nagari Lubuk Jantan di Kabupaten Tanah Datar dan pada akhirnya kembali lagi ke Halaban (2021, 11).

Saat di Pauh Tinggi, radio YBJ-6 sempat aktif dan terhubung dengan radio-radio di sekitar wilayah Indonesia. Namun karena wilayah Bukittinggi sudah diduduki oleh Belanda dan dikhawatirkan akan melakukan penyisiran, rombongan YBJ-6 melanjutkan perjalanan menuju ke

Balai Tengah. Sementara rombongan Sjafruddin Prawiranegara meninggalkan Halaban menuju Lubuk Bakung dan Bakinang untuk menghindari Belanda (2003, 725).

Rombongan YBJ-6 yang diperkirakan terdiri dari 15 orang ini mulai mengalami kesulitan saat hendak menuju Balai Tengah Lintau, karena rute perjalanannya tidak memungkinkan menggunakan kendaraan roda empat. Sehingga rombongan terpaksa berjalan kaki dan memikul pemancar radio YBJ-6 seberat 750 kilogram beramai-ramai. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju ke Palo Alai hingga berhenti di Lareh Aia (*Berita Yudha* 1989).

Di Lareh Aia inilah rombongan gerilya YBJ-6 berhenti sejenak selama tiga bulan dari bulan Januari hingga Maret 1949. Rombongan pembawa radio ini bersembunyi di rumah gadang inyiak soma, sembari mengaktifkan YBJ-6 agar terhubung dengan radio VWX-2 di India. Pasca jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda, komunikasi Indonesia dengan negara luar terputus. Sehingga PDRI mengandalkan YBJ-6 agar bisa terhubung dengan luar negeri, khususnya India yang tengah mengadakan Konferensi Asia. Tujuannya untuk menyakinkan negara luar atas keberadaan pemerintah Indonesia yang tetap bertahan dari serangan Belanda. Secara bersamaan A.A. Maramis juga berada di New Delhi untuk menghadiri Konferensi Asia sebagai perwakilan Indonesia (2021, 11).

Rombongan ini pun berusaha untuk terhubung dengan radio milik India, karena radio VMX-2 memang belum pernah terhubung dengan YBJ-6. Usaha ini dilakukan setiap malam mulai tanggal 14 Januari 1949 dengan mengirimkan kode morse radio. Pada tanggal 17 Januari 1949, usaha yang dilakukan salah satu tim ini pun membuahkan hasil, radio VWX-2 India merespon dengan mengirim kode morse balasan. Tim kemudian membalas dengan menyampaikan kode morse yang intinya meminta kerjasama agar radio VWX-2 bisa terhubung dengan YBJ-6 (*Berita Yudha* 1989).

Mendengar pemancar radio YBJ-6 sudah terhubung dengan VWX-2 India, Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara langsung mengirimkan informasi pertamanya ke Dr. Sudarsono yang mendampingi A.A. Maramis di New Delhi. Di mana pesan tersebut adalah harapan Indonesia agar mendapatkan dukungan kebebasan dari penjajahan Belanda, dan pengakuan keberadaan Pemerintahan Indonesia yang masih berdaulat dan berdiri melawan Agresi Militer Belanda. (*Berita Yudha* 1989) Hasilnya telah disepakati oleh negara yang ikut serta dalam Konferensi Asia di antaranya pembebasan tawanan politik oleh bangsa barat, mendesak Belanda mengembalikan wilayah yang diduduki, meminta penghapusan blokade ekonomi bangsa barat dan mendukung kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Kesepakatan tersebut kemudian diteruskan ke Dewan Keamanan PBB untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan resolusi Indonesia dan Belanda (2014).

Selain melakukan kontak dengan India, radio YBJ-6 juga menyiarkan berita-berita ke dalam maupun luar negeri sekaligus memonitor berita baik dari dalam-luar negeri. Saat menyiarkan berita dalam negeri, YBJ-6 banyak dikenal dengan sebutan Siaran Bukit Barisan. Siaran tersebut bertujuan untuk mengcounter propaganda Belanda yang melemahkan keyakinan rakyat Indonesia. Belanda pun akhirnya mengincar YBJ-6 dan mendeteksi keberadaan pemancar tersebut. Demi menghindari serangan Belanda, setelah bulan Maret 1949, rombongan YBJ-6 mulai bergerilya lagi. Mereka berpindah-pindah, mulai dari Tanjung Bonai Aur ke Tampurungo, lalu ke Sumpur Kudus, kemudian Silantai dan ke Unggan (Wilayah Sijunjung). Perjalanan dilanjutkan lagi ke Padang Lunggo, Tanjung Lansek dan Pamasihan. Hingga akhirnya Belanda mengakui sepenuhnya kedaulatan Indonesia, rombongan YBJ-6 pun mengakhiri gerilyanya dan kembali ke Halaban (2021, 11).

3.5. Peran Radio Rimba Raya

Kehadiran mesin Radio Rimba Raya di Aceh berawal dari kebutuhan akan pemancar radio, di mana difungsikan sebagai siaran umum. Pasca meletusnya agresi militer dengan ditandai penyerangan Yogyakarta, serta penghancuran stasiun-stasiun pemancar radio RRI oleh Belanda, membuat pemancar Radio Rimba Raya saat itu sangat berharga. Radio Rimba Raya pun dimanfaatkan sebagai alat perjuangan untuk menangkal propaganda Belanda.

Pemancar Radio Rimba Raya sendiri merupakan barang selundupan dari Malaya. Pemancar radio yang kelak dikenal sebagai Radio Rimba Raya ini dibawa oleh sejumlah prajurit Republik Indonesia dari Singapura menuju Aceh melalui jalur pantai Sumatera. Setelah mendarat di Aceh, pemancar tersebut diaktifkan di Krue Simpo. Di tempat tersebut, pemancar radio difungsikan sebagai pemancar siaran umum dan mengabarkan berbagai pengumuman. Tetapi belum lama mengudara di

Krue Simpo, pemancar tersebut dipindahkan ke Cut Gue Kutaraja. Pemindahan pemancar radio dilakukan lantaran pertimbangan agar informasi yang dikabarkan dapat diperoleh lebih cepat (M. Syam 2015).

Tak selang beberapa lama, serangan agresi militer kedua Belanda berlangsung. Segala alat komunikasi milik Republik Indonesia dilumpuhkan oleh Belanda. Bahkan radio RRI Yogyakarta tidak mampu mengudara. Lumpuhnya pemancar radio milik Republik Indonesia ini kemudian dimanfaatkan oleh Belanda. Militer Belanda menyiarkan propaganda melalui pemancar-pemancar radio di Batavia, Medan dan Hilversium. Belanda menyebarkan pengaruhnya dengan klaim bahwa Indonesia sudah tidak ada (2019, 3).

Bersamaan dengan itu, sejumlah pemancar radio di Aceh juga mengalami hal yang sama dengan radio RRI Yogyakarta. Beruntung mesin pemancar Radio Rimba Raya selamat. Selanjutnya pemancar radio tersebut dimanfaatkan sebagai senjata untuk membalas propaganda dari Belanda. Pemancar Radio ini pun dipindahkan dari Kutaraja menuju ke Burni Bius Aceh Tengah pada tanggal 20 Desember 1948, karena wilayah Burni Bius dianggap strategis dan mampu memancarkan radio dengan baik (*Berita Yudha* 1994).

Rencana pemindahan pemancar radio ke Burni Bius diurungkan setelah adanya penjagaan dan operasi militer yang ketat dari pihak Belanda. Demi menghindari resiko yang berat dan kontak senjata dengan pihak Belanda, misi pemindahan pemancar radio ini pun dialihkan ke Hutan Rimba Raya Kecamatan Timur Gajah Aceh Tengah. (Sufi 1999, 53) Di Hutan Rimba Raya ini pemancar radio tersebut mengudara, dan dikenal dengan sebutan Radio Rimba Raya. Radio Rimba Raya ini pun sangat berperan penting dalam meneruskan informasi dan pengumuman RRI, sehingga Radio Rimba Raya memiliki peran sentral untuk mengisi kekosongan siaran setelah Belanda menguasai pemancar radio Republik Indonesia (M. Syam 2015).

Bahkan saat Radio Batavian dan Hilversium menyiarkan propaganda, Radio Rimba Raya mampu membantah pernyataan Belanda. Radio Rimba Raya tetap eksis mengudara dengan menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia masih memiliki wilayah serta memiliki pimpinan. Siaran Radio Rimba Raya juga mampu mengudara ke luar negeri, hingga ditangkap oleh Radio All India. Selanjutnya Radio All India meneruskan siaran Radio Rimba Raya ke negara-negara luar lainnya, di mana siaran Radio Rimba Raya saat itu disampaikan dalam beberapa bahasa, baik Inggris, Belanda, Cinam Urdhu dan Arab. Berkat sambungan siaran tersebut Radio Rimba Raya dapat membentuk opini dunia dalam melawan Belanda (*Berita Yudha* 1994).

4. Kesimpulan

Perang kemerdekaan tahun 1948-1949 tidak hanya dilakukan secara terbuka, tetapi juga dilakukan melalui diplomasi. Hal ini tidak terlepas dari segi kekuatan militer Indonesia, yang tidak lebih kuat dibandingkan kekuatan militer Belanda. Propaganda yang dilakukan Belanda juga memberikan pengaruh terhadap strategi serta upaya preventif yang dilakukan pejuang Indonesia. Syafrudin Prawiranegara yang menjadi pimpinan PDRI langsung memerintahkan untuk memanfaatkan radio sebagai alat perjuangan. Radio-radio yang masih aktif dimanfaatkan sebagai alat berkomunikasi maupun siaran yang memuat pesan-pesan perjuangan dalam menangkal propaganda Belanda. Sebagaimana radio YBJ-6 yang digunakan oleh PDRI sebagai alat berkomunikasi serta siaran umum. Selain menyebarkan pesan perjuangan, radio YBJ-6 juga berusaha untuk terhubung dengan radio VWX-2 India dalam rangka mengirimkan pesan diplomasi. Pada tanggal 17 Januari 1949, Radio YBJ-6 pun terhubung dengan VWX-2 India. Saat itu juga Radio YBJ-6 mengirimkan pesan dari Sjafruddin Prawiranegara kepada A.A. Maramis yang sedang menghadiri Konferensi Asia di New Delhi. Pesan diplomatik tersebut, meminta kepada A.A. Maramis untuk meminta dukungan pengakuan dari negara-negara yang hadir dalam konferensi tersebut. Sedikit berbeda dengan Radio Rimba Raya yang menyiarkan pesan-pesan perjuangan Bangsa Indonesia untuk bisa mengudara hingga ke luar negeri. Siaran Radio Rimba Raya pun berhasil mengudara hingga ditangkap oleh Radio All India. Selanjutnya siaran diteruskan Radio All India untuk disiarkan kembali ke negara-negara lain. Meskipun Radio YBJ-6 dan Radio Rimba Raya dimanfaatkan secara berbeda dalam perjuangan, tetapi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia tidak terlepas dari peranan kedua radio ini. Melalui Radio YBJ-6 dan Radio Rimba Raya pesan perjuangan Indonesia

telah tersampaikan, sehingga mempengaruhi opini dunia melawan Belanda dan kedaulatan Indonesia bisa diakui.

References

- 30 Tahun Indonesia Merdeka*. 1986. 1945-1949. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- A. Masyhur Effendi and Andri Andri. 2011. "Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Lex Jurmalica* 8 (3).
- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA Press.
- Andriyanto, Andriyanto, Adi Putra Surya Wardhana, and Dennys Pradita. 2021. "Peoples of The Indies: Anti-Japanese Propaganda Film by The Dutch." *Candra Sangkala* Vol. 3 No. 2. <https://doi.org/10.23887/jcs.v3i2.47047>.
- Asmara, Dedi, and Yuhardi Yuhardi. 2022. "Batalion Singa Harau (1945-1949)." *Jurnal Edukasi*, 2 (1): 63–74.
- Barendregt, Bart A., and Philip Yampolsky, eds. 2014. *Sonic Modernities in the Malay World: A History of Popular Music, Social Distinction and Novel Lifestyles (1930s-2000s)*. Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde, volume 290. Leiden: Brill.
- Berita Yudha. 1984a. "Korps Perhubungan TNI-Angkatan Darat 39 Tahun," November 26, 1984. <https://mpn.kominfo.go.id/arsip/detail/99834/sheet?q=Radio%20PHB>.
- . 1984b. "Penyerbuan Yogyakarta 19 Desember 1948 Oleh Belanda Menguntungkan Indonesia," December 20, 1984. <https://mpn.kominfo.go.id/arsip/detail/100019/sheet?q=PDRI>.
- . 1989. "Menteri Parpostel Akan Resmikan Napak Tilas Pemancar YBJ-6," December 15, 1989.
- . 1994. "Radio Rimba Raya Di Aceh Berhasil Membentuk Opini Dunia Dalam Melawan Belanda.," February 25, 1994.
- Fani Adzikri. 2017. "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Penguatan Pendidikan Oleh Resimen Mahasiswa Satuan 126 Muhawarman Mellau Cagar Budaya Radio YBJ-6 PDRI." *Prosiding Seminar Nasional 20 Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, November.
- Fitri Puspa Sari, and Agus Trilaksana. 2014. "Konfrensi Asia Di New Delhi 20-25 Januari 1949 (Bentuk Dukungan Negara-Negara Asia Kepada Indonesia Pasca Agresi Militer Belanda II)." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, No 1, Volume 2 (March).
- Habibi Muttaqin. 2019. *Peran Radio Rimba Raya Dalam Mempertahankan NKRI 1945-1949*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Imran, Amrin, Saleh As'ad Djamhari, and J. R. Chaniago. 2005. *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dalam perang kemerdekaan*. Cet. 2. Jakarta: Citra Pendidikan.
- M. Syam, Hamdani. 2015. "Sistem Penyiaran Di Aceh Dari Era Kolonial Belanda Hingga Orde Baru: Satu Perspektif Sejarah." *Jurnal Al-Bayan* 21 (32): 84–96. <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v21i32.426>.
- M.C. Ricklefs. 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Cet. 1. Jakarta: Serambi.
- Mintargo, Wisnu. 2003. "Lagu Propaganda Dalam Revolusi Indonesia: 1945-1949." *Jurnal Humaniora* 15 No 1 (February).
- Muttaqin, Habibi, Sabil Mokodenseho, and Febby Widjayanto. 2022. "Defending Indonesian Sovereignty through Mass Media: Radio Rimba Raya in the Revolutionary War." *Indonesian Historical Studies* 6 (1): 1–18. <https://doi.org/10.14710/ihis.v6i1.13821>.
- Nopriyasan. 2021. "Jejak Perjalanan Sejarah Perjuangan PDRI Periode Desember 1948-Maret 1945." In *Penelusuran Kembali Sejarah PDRI*. Banten.
- Permana, Rangga Saptya Mohamad, Aceng Abdullah, and Jimi Narotama Mahameruaji. 2019. "Budaya Menonton Televisi Di Indonesia: Dari Terrestrial Hingga Digital." *ProTVF* 3 (1): 53. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i1.21220>.
- Peter Burke. 2015. *Sejarah Dan Teori Sosial*. Jakarta: Obor.
- Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, and Ediati Kamil. 2003. *Kronik Revolusi Indonesia Jilid IV 1948*. Jakarta: KPG.

- Prapanca Wardhana, Ivan, Muhadi Muhadi, and Ageng Sanjaya. 2019. "Keterlibatan Tentara Pelajar Pada Serangan Umum Empat Hari Di Surakarta Tahun 1949." *Jurnal Keraton* Vol. 1 No.1. <https://doi.org/10.32585/keraton.v1i1.321>.
- Setyo Nugroho. 2013. "Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan." *Jurnal Cita Hukum* 1 (2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2633>.
- Soetomo. 1945. "Radio Dan Masyarakat." *Djawa Baroe*, July 15, 1945. <https://mpn.kominfo.go.id/arsip/detail/58650/sheet?q=Radio%20dan>.
- Sufi, Rusdi. 1999. *Perkembangan Media Komunikasi Di Daerah: Radio Rimba Raya Di Aceh*. Ed. 1999. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Supian, Supian, and Lagut Lagut. 2020. "PERTEMPURAN KASIRO-SUNGAI PINANG BATANG ASAI MENGHADAPI AGRESI MILITER BELANDA II DI KEWEDANAAN SAROLANGUN 1948-1949." *Keraton: Journal of History Education and Culture* 2 (2). <https://doi.org/10.32585/.v2i2.1161>.
- Theresia Sundari Eko Wati. 2010. "Peran Radio Perhubungan Dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia." Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode penelitian kepustakaan*. Ed. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.